



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2021



**BIRO KERJASAMA
ANTAR PARLEMEN**

**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Kata pengantar

Endah Tjahyani D. Retnoastuti

Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen Setjen DPR RI

Mengucapkan syukur Alhamdulillah tahun 2021 dapat dilalui dengan baik walaupun dengan berbagai tantangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, COVID-19. Dengan seluruh negara terdampak oleh pandemi ini, dunia harus beradaptasi pada kondisi seperti normal yang baru.

Pertemuan virtual tidak terelakkan dan pertanyaannya tidak lagi apakah pertemuan virtual tetap dilaksanakan mengingat berbagai kelemahannya, namun sekarang adalah bagaimana mengefektifkan pertemuan virtual.

Disisi lain berbagai isu baru bermunculan, hubungan diplomatik terkena ketegangan seputar perdagangan dan transport obat-obatan, test diagnosa dan peralatan rumah sakit untuk penanganan COVID 19. Pemimpin sebagian negara menuduh negara lainnya tidak dapat membendung

pandemi ini dengan baik yang menyebabkan penyebaran yang tidak terkendali.

Dengan latar belakang suasana diplomasi internasional seperti itu, Biro Kerjasama Antar Parlemen menyampaikan laporan kinerja 2021. Lakip adalah instrumen pertanggungjawaban terkait pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan sesuai Indikator Kinerja untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, dan anggaran yang diamanatkan.

Berbagai temuan dan rekomendasi dalam LAKIP ini adalah sebagai evaluasi dan perbaikan kinerja kedepan.

Akhir kata, saran dan masukan untuk perbaikan kinerja Biro KSAP sangat diharapkan.

Terima kasih

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 20A ayat (1), DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang diatur selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPR RI tersebut dan sesuai perubahan struktur dan ketatalaksanaan Setjen DPR RI sebagaimana diamanatkan oleh UU MD3 tersebut telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI). Setjen dan BK DPR RI adalah aparatur pemerintah yang didalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.

Setjen DPR RI mempunyai tugas dan fungsi mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibidang administrasi dan persidangan, dan BK DPR RI mempunyai tugas dan fungsi mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian. Dalam pelaksanaan tugasnya, Setjen DPR RI dibantu Deputi Bidang Persidangan dan Deputi Bidang Administrasi. Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro KSAP) adalah unit kerja dibawah Deputi bidang Persidangan.

Untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, telah dibentuk berbagai peraturan seperti Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Sekjen DPR RI No. 400 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Setjen DPR RI yang telah disempurnakan dengan

Peraturan Sekjen No. 3 Tahun 2010 dan diperbaharui lagi dengan peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dimana Biro Kerja Sama Antar Parlemen berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Persidangan. Dari beberapa peraturan tersebut, dikemukakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kerja Sama Antar Parlemen tahun 2021 adalah bentuk akuntabilitas pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2021 dan sebagai evaluasi untuk perbaikan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen di masa yang akan datang.

B. KELEMBAGAAN

1. KEDUDUKAN

Peraturan Berdasarkan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/Sekjen/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen Nomor 3/PERSEKJEN/2010 dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2021, Biro Kerja Sama Antar Parlemen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Persidangan.

2. TUGAS POKOK

Biro Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih bahasa.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Biro Kerja Sama Antar Parlemen menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kerja Sama Antar Parlemen;

- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen;
- g. Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi internasional dan dukungan analisis terhadap isu internasional;
- h. Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi regional dan dukungan analisis terhadap isu regional;
- i. Penyelenggaraan persidangan kerjasama bilateral dan dukungan analisis terhadap isu bilateral;
- j. Penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- k. Penyelenggaraan dukungan alih bahasa;
- l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;
- m. Penyusunan laporan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen; dan
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

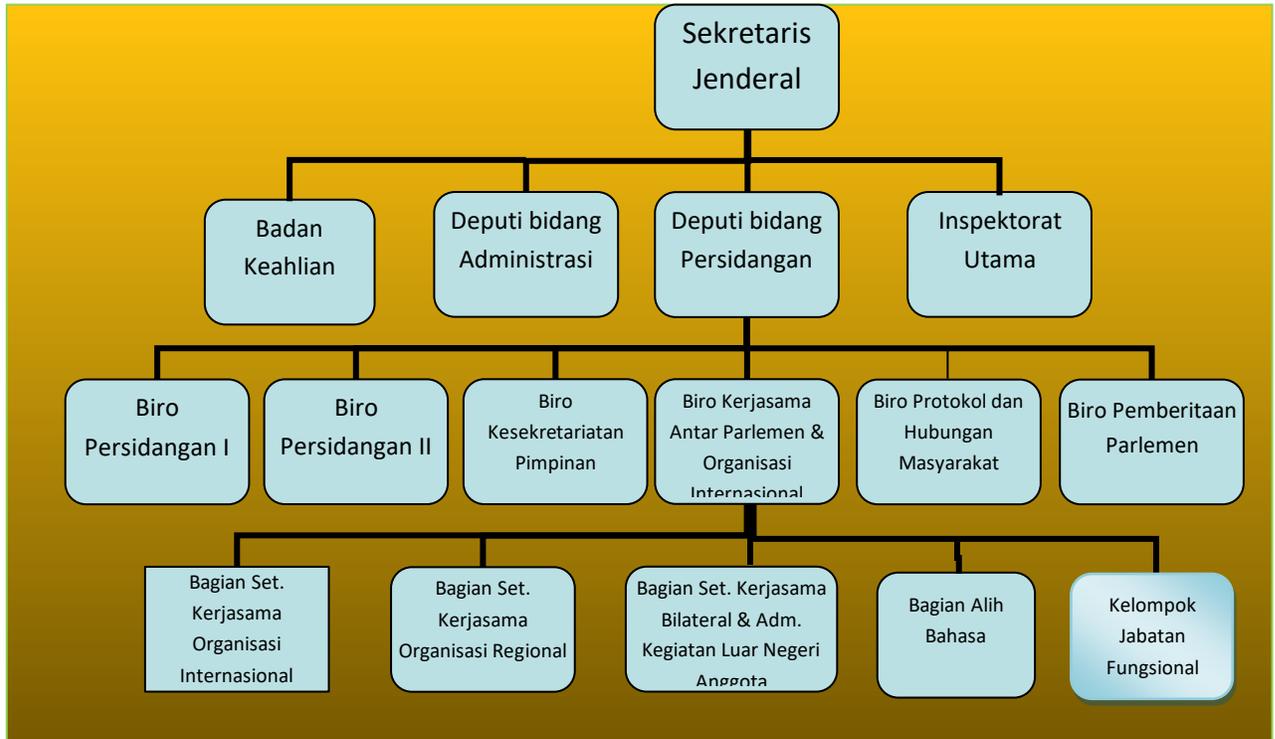
C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Biro Kerja Sama Antar Parlemen terdiri dari :

1. Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional (KSI).
2. Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional (KSR);
3. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral & Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota;
4. Bagian Alih Bahasa; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN



Sumber : Struktur Organisasi Setjen dan BK DPR RI tahun 2021

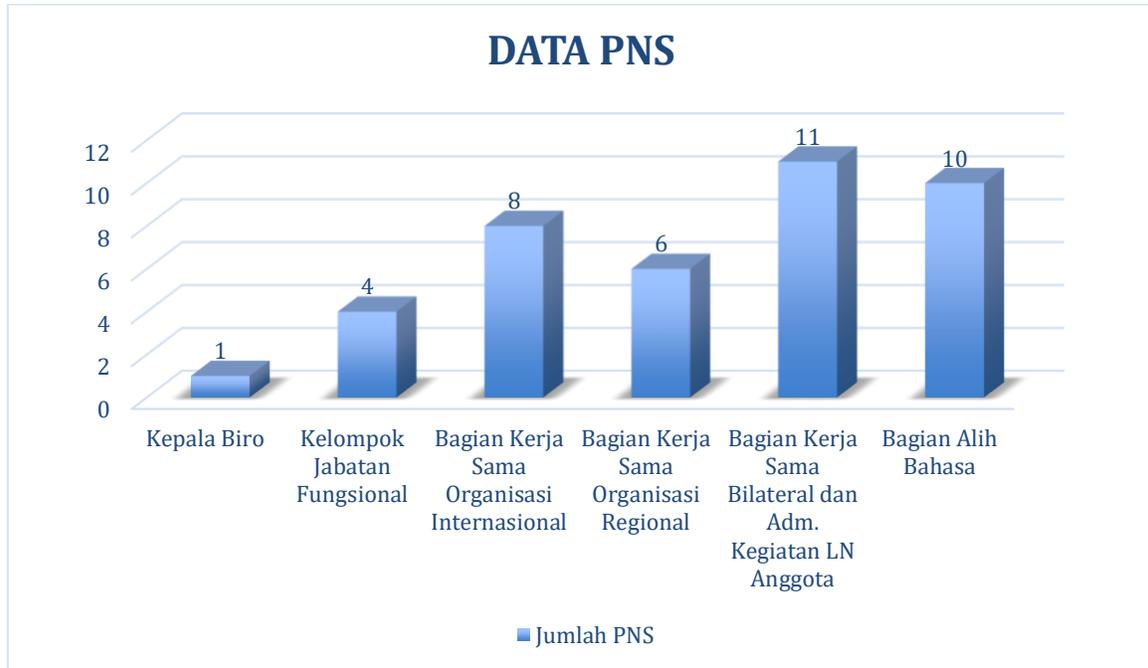
D. SUMBER DAYA MANUSIA DI BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Biro Kerjasama Antar Parlemen berjumlah 21 orang, terdiri dari Kepala Biro dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di 4 unit kerja yaitu:

- 1) Bagian Set. Kerjasama Bilateral dan Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
- 2) Bagian Set. Kerjasama Organisasi Regional
- 3) Bagian Set. Kerjasama Organisasi Internasional
- 4) Bagian Alih Bahasa

Gambar 2

Grafik Data PNS di lingkungan Biro KSAP Tahun 2021



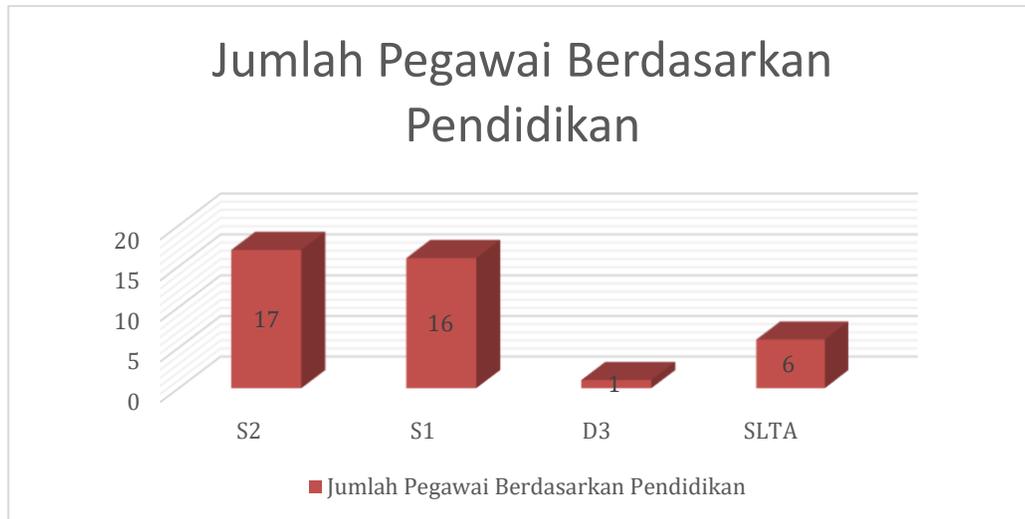
Sumber data : Bagian Kepegawaian Setjen dan BK DPR RI per 31 Desember 2021

Disamping Pegawai Negeri Sipil, Biro Kerjasama Antar Parlemen juga didukung dengan 5 orang Tenaga Ahli yang memberikan dukungan dalam hal substansi dan keahlian kepada Anggota BKSAP.

Dalam hal kualitas, BKSAP didukung dengan pegawai yang semakin tahun semakin meningkat latar belakang pendidikannya. Tahun 2021, terdapat 15 PNS yang memiliki latar pendidikan S2, 18 orang PNS merupakan lulusan S1, 2 orang PNS lulusan D3 dan 6 orang PNS lulusan SLTA. Dengan latar belakang pendidikan yang semakin tinggi diharapkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas masing-masing semakin meningkat dan berkualitas, memiliki kemampuan manajerial yang semakin baik, berkoordinasi, komunikasi dan beradaptasi terhadap perubahan organisasi juga semakin mumpuni. Berikut ini tabel pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

Gambar 3

Grafik data PNS di lingkungan Biro KSAP berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

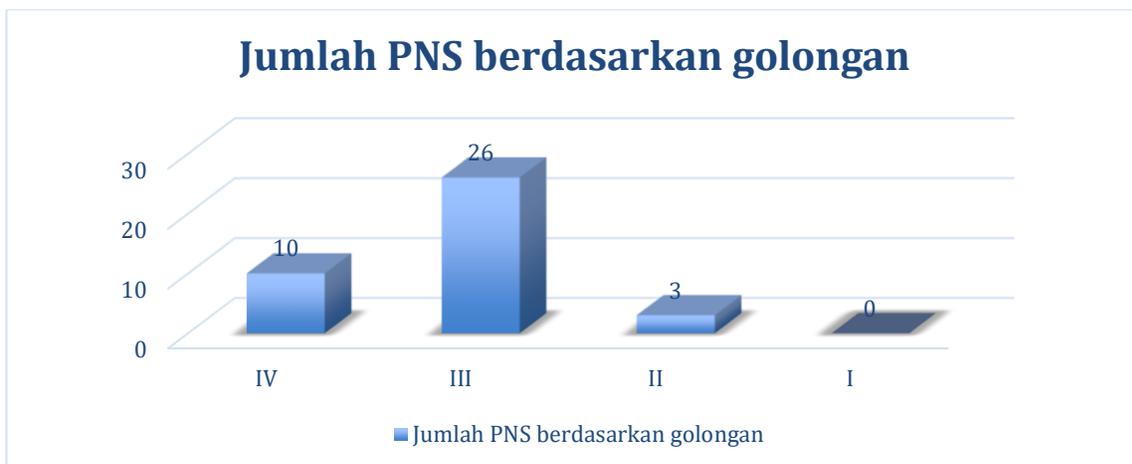


Sumber : Data Bagian Kepegawaian Setjen dan BK DPR RI per 31 Desember 2021

Berdasarkan Golongan, Biro KSAP memiliki pegawai yang mayoritas golongan III, hal ini berarti bahwa masa kerja dan pengalaman serta kemampuan PNS di lingkungan Biro KSAP sudah baik. Sedangkan PNS Golongan I di Biro KSAP sudah tidak ada, dan untuk mengisi pekerjaan yang berkaitan dengan pengantaran surat dan penyajian jamuan rapat dilakukan oleh Pegawai honorer. Berikut ini grafik PNS di Lingkungan Biro KSAP berdasarkan golongan.

Gambar 4

Grafik Data PNS di lingkungan Biro KSAP berdasarkan Golongan Tahun 2021



Sumber : Data Bagian Kepegawaian Setjen dan BK DPR RI 2021

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Melalui perencanaan organisasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, administrasi serta dukungan teknis lainnya, Biro Kerja Sama antar Parlemen mendukung dan memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan misi diplomasi Parlemen yang dilaksanakan oleh DPR RI.

Misi diplomasi DPR tersebut tidak saja melalui dialog atas berbagai isu-isu internasional dalam kerangka organisasi yang merangkum kerjasama keparlemenan dan kerjasama bilateral tetapi juga melalui pengawasan terhadap berbagai negosiasi internasional dan pelaksanaan berbagai kesepakatan yang sudah diadopsi oleh pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, perjanjian-perjanjian internasional tersebut selalu mendahulukan kepentingan nasional, sejalan dengan norma dan hukum internasional dan menjunjung tinggi penegakan hukum di dalam negeri. Salah satu contohnya, dimana BKSAP DPR RI telah mengambil peran strategis misalnya di daerah perbatasan. Mengingat negara-negara di kawasan Pasifik menganut sistem parlementer, peran DPR RI dalam kerangka *multi-track diplomacy* menjadi signifikan guna menyampaikan pandangan dan sikap pemerintah serta rakyat Indonesia yang tetap mengutamakan kedaulatan NKRI. Masalah kemerdekaan Palestina dan kontribusi terhadap krisis kemanusiaan warga Rohingya di Myanmar, juga masih menjadi fokus diplomasi BKSAP tahun 2021, selain juga issue Pembangunan Berkelanjutan .

Berbagai keterlibatan DPR RI di kancah internasional tersebut didukung oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) sebagai bagian dari Kesekretariatan Jenderal dan Badan Keahlian yang memberikan dukungan teknis dan keahlian kepada Dewan.

Saat ini Biro KSAP bukan saja memberikan dukungan kepada anggota BKSAP yang berjumlah 52 orang, namun juga kepada Pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI

yang berjumlah 575 orang melalui program Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) dan kunjungan diplomasi parlemen perorangan. Bukan itu saja, Biro KSAP juga memberi dukungan kepada anggota parlemen sedunia yang menjadi anggota ASEAN *Parliamentarians against Corruption (SEAPAC)* mengingat saat ini Indonesia menjadi markas besar dari organisasi tersebut.

Pada Tahun 2022 Biro KSAP menjadi tuan rumah kegiatan Sidang *Inter-Parliamentary Union (IPU)* Ke-144 yang dilaksanakan di Bali, selain itu Biro KSAP juga akan melaksanakan penyelenggaraan *G20 Parliamentary Speakers Consultation Meeting* atau P20 sebagai bagian dari Presidensi Indonesia di G20.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Biro Kerja Sama Antar Parlemen pada tahun 2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul, telah menyusun Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap tiga fungsi DPR RI, program kerja Biro KSAP mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan dan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2021-2024 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

1. Visi

Rumusan visi dan misi Biro Kerja Sama Antar Parlemen mengacu pada visi dan misi Deputi Bidang Persidangan, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu menyiapkan dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang Persidangan dan Kerja Sama antar Parlemen, sehingga visi Biro KSAP adalah:

"TERWUJUDNYA DUKUNGAN KEGIATAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN YANG BERKUALITAS, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL"

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro KSAP, yaitu:

- a. Mewujudkan analisis isu-isu bilateral, yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat, serta alih bahasa yang akurat.
- b. Mewujudkan analisis isu-isu regional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.
- c. Mewujudkan analisis isu-isu internasional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.
- d. Mengembangkan Database yang akurat dan inovasi teknologi terbaru untuk mendukung kegiatan kerja sama antar parlemen.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan hasil analisis isu-isu bilateral, regional dan internasional yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi BKSAP.
- b. Meningkatkan dukungan teknis, administrasi dan alih bahasa yang berkualitas dan tepat waktu.

Dengan mengacu pada tujuan tersebut, Biro KSAP dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

4. Sasaran

- 1) Sasaran yang menggunakan anggaran satker setjen yaitu
“meningkatnya kualitas dukungan diplomasi parlemen”

Dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan

2. Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan
 3. Presentase sambutan, *talking points* , dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan
 4. Presentase Dukungan Penterjemah yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan
 5. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen
 6. Persentase realisasi anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen
- 2) Sementara untuk sasaran yang menggunakan satker dewan adalah :
1. Diplomasi Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri
Dengan indikator : jumlah pengiriman delegasi dalam rangka pengembangan hubungan Kerjasama luar negeri
 2. Diplomasi perorangan Anggota DPR RI dalam rangka pengembangan Hubungan Kerjasama luar negeri : jumlah pengiriman delegasi dalam rangka pengembangan hubungan Kerjasama luar negeri
 3. Sidang/Konferensi di Dalam Negeri
Dengan indikator : Jumlah penyelenggaraan Sidang/Konferensi di dalam negeri

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Biro KSAP telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Perjanjian kinerja Biro KSAP disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja adalah memuat sasaran-sasaran strategis Deputi Bidang Persidangan tahun 2015-2019. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Biro KSAP tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama Antar Parlemen Tahun 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Satker Setjen			
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	1. Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
		2. Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
		3. Presentase sambutan, talking points, dan laporan	100%

		kegiatan Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	
		4. Presentase Dukungan Penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%
		5. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,22
		6. Presentase realisasi anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen	92,5%
Satker Dewan			
1.	Diplomasi Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah pengiriman delegasi dalam rangka pengembangan hubungan kerjasama luar negeri	28 Kegiatan
2.	Diplomasi Perorangan Anggota DPR RI dlm rangka Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah pengiriman delegasi dalam rangka pengembangan hubungan kerjasama luar negeri	115 kegiatan
3.	Sidang/ Konferensi di Dalam Negeri	Jumlah penyelenggaraan Sidang/Konferensi di dalam negeri	3 Kegiatan

Mengingat Biro KSAP secara anggaran bertanggung jawab untuk dua satuan kerja, yaitu satuan kerja dewan dan satuan kerja sekretariat, maka untuk sasaran program/kegiatan juga dibagi menjadi dua dengan indikator dan jumlah target yang berbeda.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Selama tahun 2021 Biro Kerja Sama antar Parlemen (KSAP) telah melaksanakan kegiatan dukungan terhadap fungsi Diplomasi Parlemen yang dilaksanakan oleh DPR RI. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan diarahkan berpedoman kepada Renstra Biro KSAP 2015 – 2021.

Biro Kerjasama Antar Parlemen secara administratif menjadi PPK atas Anggaran Satker Setjen dan Satker Dewan. Untuk itu, LAKIP Biro KSAP tidak hanya menjelaskan mengenai capaian kinerja atas Satker Setjen, melainkan juga capaian kinerja dalam Satker Dewan. Dan sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dengan gambaran capaian adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Capaian Kinerja Biro KSAP Tahun 2021

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Satker Setjen				
Sidang/ Konferensi di Dalam Negeri	1. Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%	100%	100 %

	2.Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
	3.Presentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
	4.Presentase Dukungan Penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	100%	100%	100 %
	5.Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,22	3,22	100%
	6.Presentase realisasi anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen	92,5%	95%	100%
Satker Dewan :				
Diplomasi Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah pengiriman delegasi dalam rangka pengembangan hubungan kerjasama luar negeri	28 Kegiatan	36 Kegiatan	129%
Diplomasi Perorangan Anggota DPR RI dlm rangka Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah pengiriman delegasi dalam rangka pengembangan hubungan kerjasama luar negeri	115 kegiatan	34 kegiatan	30%

Sidang/Konferensi di Dalam Negeri	Jumlah penyelenggaraan Sidang / Konferensi di dalam negeri	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,3%
-----------------------------------	--	------------	------------	-------

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa pada tahun 2021 capaian kinerja Satker Setjen telah terealisasi sebesar 100% untuk 5 indikator kerjanya, sementara untuk indikator “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen tercapai 3,22.

Adapun untuk Satker Dewan untuk indikator kinerja “jumlah pengiriman delegasi dalam rangka pengembangan hubungan kerja sama luar negeri telah mencapai 129% dari targetnya. Hal ini dikarenakan banyaknya sidang-sidang yang dilakukan secara virtual di masa pandemi, sehingga delegasi banyak menghadiri berbagai sidang.

Untuk jumlah pengiriman delegasi dalam rangka pengembangan hubungan kerjasama luar negeri, tidak dapat mencapai target sebesar 115 kunjungan, karena di masa pandemi ini banyak negara yang menutup diri sehingga tidak bisa dikunjungi dan adanya aturan yang ketat untuk pelaksanaan kunjungan ke luar negeri, termasuk pengaturan karantina di berbagai negara, sehingga capaiannya masih rendah. Dari 115 yang ditargetkan terealisasi sebanyak 34 kunjungan perorangan.

Untuk indikator jumlah penyelenggaraan sidang/konferensi di dalam negeri, capaian yang diperoleh 33,3 % karena dari 3 kegiatan yang direncanakan terlaksana hanya satu sidang. Hal ini dikarenakan masih belum meredanya pandemi Covid 19 sehingga beberapa sidang yang seharusnya dapat dilaksanakan terpaksa ditunda pelaksanaannya.

Untuk perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, untuk sakter Setjen tidak bisa dibandingkan, karena indicator kerjanya mengalami perubahan.

Untuk capaian kinerja untuk Satker Dewan dapat digambarkan dalam table berikut ini:

Tabel 3
Perbandingan Capaian Kinerja Biro KSAP Tahun 2020 dan 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Satker Dewan :								
	2020			2021			Perub.	
1	Jumlah pengiriman delegasi dalam rangka pengembangan hubungan kerjasama luar negeri	34 kali	45 kali	132%	28 keg.	36 keg.	128%	-5%
2	Jumlah pengiriman delegasi dalam rangka pengembangan hubungan kerjasama luar negeri	100	88	88%	115 Keg.	34 keg.	30%	-58%
3	Jumlah penyelenggaraan Sidang / Konferensi di dalam negeri	2 kali	1kali	50%	3 konf	1 konf	33.3%	-16,7%

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2021 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SATKER SETJEN

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Dukungan Diplomasi Parlemen

Sasaran ini memiliki 6 indikator utama, yaitu:

1. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan, dengan target 100%

2. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan, dengan target 100%
3. Persentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan, dengan target 100%
4. Persentase Dukungan Penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan, dengan target 100%
5. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen, dengan target 3,22
6. Persentase realisasi anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen, dengan target 92,5%

Indikator 1		
Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Pada akhir tahun 2021, Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan, mencapai target sebesar 100%. Untuk pencapaian ini tidak dapat diperbandingkan karena adanya perubahan indikator kinerja pada tahun 2020 ke 2021.

Kajian, konsep resolusi, pernyataan dan laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimaksudkan disini adalah berbagai dokumen persiapan ketika DPR RI mengirimkan delegasi untuk menghadiri sidang-sidang Internasional, Biro KSAP sebagai supporting system menyiapkan berbagai kajian, konsep resolusi, dan juga laporan kegiatan bagi Anggota DPR RI yang menghadiri sidang-sidang tersebut. Laporan kegiatan telah dipublikasikan di website ksap.dpr.go.id.

Selain pengiriman delegasi menghadiri konferensi Internasional, Biro Kerjasama Antar Parlemen juga bertanggung jawab dalam mempersiapkan penyelenggaraan dua sidang internasional yang diselenggarakan di Indonesia yaitu *the First Global Parliamentary Meeting on Achieving for SDGs*, tanggal 28 – 30 September di Hotel Kempinski Jakarta dan pelaksanaan peluncuran *SDGs Dashboard* di Hotel JHL Solitaire, Tangerang pada tanggal 19 Agustus 2021 serta kegiatan Dewan lainnya seperti mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kunjungan dalam negeri dalam rangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Beberapa kegiatan sidang Internasional ditunda atau bahkan dibatalkan karena Pandemi COVID-19, sebagian kegiatan lagi dilaksanakan dengan konsep virtual.

Indikator 2		
Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Pada akhir tahun 2021, Presentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan, mencapai target sebesar 100%.

Selain menghadiri sidang-sidang Internasional, DPR RI juga menghadiri sidang-sidang regional oleh karena itu, yang dimaksud dengan indikator 2 disini adalah berbagai dokumen persiapan ketika DPR RI mengirimkan delegasi untuk menghadiri sidang – sidang Regional. Biro KSAP sebagai supporting system menyiapkan berbagai kajian, konsep resolusi, dan juga laporan kegiatan bagi Anggota DPR RI yang menghadiri sidang-sidang tersebut. Laporan kegiatan berbagai sidang regional juga telah dipublikasikan di website ksap.dpr.go.id.

Indikator 3		
Presentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Pada akhir tahun 2021, Presentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral dan Diplomasi Perorangan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan mencapai target sebesar 100%.

Untuk mendukung kegiatan bilateral, Biro KSAP juga menyiapkan dukungan bahan-bahan seperti sambutan, talking points maupun laporan-laporan kegiatan.

Laporan pertemuan Courtesy Call maupun kegiatan bilateral lain maupun laporan kunjungan diplomasi perorangan juga telah dipublikasikan di website ksap.dpr.go.id

Indikator 4		
Presentase Dukungan Penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan		
Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Pada akhir tahun 2021, Presentase dukungan penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan, mencapai target sebesar 100%.

Tabel 4
Rincian Kegiatan Penerjemahan

Output	Masa Sidang III 11 Jan - 7 Maret	Masa Sidang IV 8 Maret - 5 Mei 2021	Masa Sidang V 6 Mei - 15 Agt 2021	Masa Sidang I 16 Agt - 31 Okt 2021	Masa Sidang II 1 Nov 2021 - 9 Jan 2022	Total
I. Terjemahan Lisan, terdiri dari :						
Bahasa Inggris	17 Kegiatan	42 Kegiatan	34 Kegiatan	14 Kegiatan	25 Kegiatan	132 Kegiatan
Bahasa Arab	-	-	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan
Bahasa Isyarat	-	-		1 kegiatan	-	1 kegiatan
II. Terjemahan Tertulis, terdiri dari :						
Bahasa Inggris dan V.V.	31 Item	22 Item	57 Item	24 Item	32 Item	166 Item
Jumlah	48	64	92	39	57	300

Biro KSAP memberikan bantuan penerjemahan tidak hanya kepada Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen, tetapi juga kepada Pimpinan DPR RI, berbagai Alat Kelengkapan DPR RI lainnya dan juga kepada Kesekretariatan Jenderal DPR RI. Tidak hanya itu, Biro KSAP juga menerjemahkan sebagian pemberitaan di website DPR RI ke dalam Bahasa Inggris.

Indikator 5		
Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen		
Target	Realisasi	Capaian
3,22	3,22	100%

Capaian Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen sebesar 100%, karena dari target nilai 3.22 telah tercapai nilai survey sebesar 3.22. Angka ini diperoleh dari hasil survey yang diberikan kepada para Anggota DPR RI yang telah merasakan layanan kegiatan diplomasi parlemen.

Indikator 6		
Presentase realisasi anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen		
Target	Realisasi	Capaian
95%	97%	102%

Capaian Indikator Presentasi realisasi anggaran Biro KSAP mencapai 102%, karena dari target 95% berhasil terealisasi hingga 97% dari total anggaran Biro KSAP.

Secara lebih rinci capaian anggaran ini akan dijelaskan dalam capaian kinerja anggaran pada point selanjutnya.

2. **SATKER DEWAN**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro KSAP mendapat amanat dari Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan Kerjasama Antar Parlemen yang dilakukan oleh DPR RI khususnya Badan Kerjasama Antar Antar Parlemen. Untuk itu Biro Kerjasama Antar Parlemen menyampaikan laporan kegiatan yang dilakukan pada Satuan Kerja Dewan sebagai bagian dari pertanggungjawaban Biro KSAP dalam mendukung terealisasinya Kegiatan DPR RI dalam kaitannya dengan Diplomasi Parlemen.

Berikut ini adalah penjelasan capaian dari sasaran pada tahun 2021.

SASARAN 1
Diplomasi Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri

Indikator		
Jumlah pengiriman delegasi dalam rangka pengembangan hubungan Kerjasama luar negeri		
Target	Realisasi	Capaian
28 Kegiatan	36 Kegiatan	129%

Untuk Sasaran 1 “Diplomasi Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri” dengan Indikator “Jumlah Keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional” ditargetkan 28 kegiatan, namun dalam pelaksanaannya telah terlaksana 36 kegiatan. Hal ini karena walaupun masih adanya pandemic covid 19, kegiatan sidang-sidang tetap berjalan walaupun secara daring.

SASARAN 2

Diplomasi Perorangan Anggota DPR RI dalam rangka Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri

Indikator		
Jumlah pengiriman delegasi dalam rangka pengembangan hubungan Kerjasama luar negeri		
Target	Realisasi	Capaian
115 Kegiatan	34 Kegiatan	30%

Capaian Kegiatan Diplomasi Perorangan Anggota DPR RI dalam rangka Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri ini hanya mencapai 30%. Hal ini dikarenakan pandemic Covid 19 membuat banyak negara menutup perbatasannya untuk

kunjungan dari luar negeri dan berbagai kebijakan yang menghambat pengiriman delegasi ke luar negeri secara fisik seperti adanya aturan harus PCR test sebelum keberangkatan, maupun aturan karantina di negara tujuan, ataupun larangan bepergian ke luar negeri. Hal tersebut menjadi berbagai bahan pertimbangan sehingga kegiatan pengiriman delegasi perorangan ini belum dapat dilakukan secara maksimal.

SASARAN 3

Sidang/ Konferensi di Dalam Negeri

Indikator

Jumlah penyelenggaraan Sidang/Konferensi di dalam Negeri

Target	Realisasi	Capaian
3	1	33%

Pada tahun 2021, Capaian untuk jumlah penyelenggaraan Sidang/Konferensi di dalam negeri adalah 33%. Hal ini dikarenakan dari target 3 sidang di tahun ini hanya dapat terselenggara 1 sidang, yaitu Penyelenggaraan sidang the *First Global Parliamentary Meeting on Achieving for SDGs* , tanggal 28 – 30 September di Hotel Kempinski Jakarta.

Dalam penyelenggaraan Konferensi Internasional di dalam Negeri, Biro Kerjasama Antar Parlemen memberikan dukungan berupa penyiapan bahan-bahan materi persidangan, baik berupa sambutan-sambutan, point-point pembicaraan, skenario sidang, administrasi untuk penentuan tempat sidang dan seluruh proses penyelenggaraan sidang dan juga dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam sidang tersebut.

Pada pelaksanaan kegiatan Biro KSAP secara keseluruhan, ada beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh Biro KSAP, antara lain :

a) Dukungan terhadap penyelenggaraan konferensi/seminar regional/internasional yang menjadi indikator tersebut, Biro KSAP juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seminar/workshop di dalam negeri lainnya sebagai berikut:

- *Focus Group Discussion (FGD) BKSAP GOPAC dan WFD : Reflecting on the Interaction Between Parliaments and Anti-Corruption Agencies in the Fighting Against Corruption*
- Kunjungan Kerja BKSAP dalam rangka “BKSAP SDGs Day” yaitu kegiatan BKSAP untuk mensosialisasikan dan melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat luas khususnya kaum muda maupun pemerintah daerah tentang BKSAP dan kinerja BKSAP yang telah tercapai maupun rencana kedepan, serta untuk mensosialisasikan berbagai tujuan dalam SDGs. Program BKSAP Day ditujukan untuk mendorong mahasiswa/kaum muda lebih sadar politik, tidak ragu menggeluti dunia politik dan bersedia terjun ke dunia politik tanpa ragu, misalnya berani menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum.

Beberapa kegiatan BKSAP Day yang telah dilakukan antara lain :

- BKSAP SDGs Day ke Universitas Hasanuddin Makasar Sulawesi Selatan (21-23 Jan)
- BKSAP SDGs Day di Kantor Gubernur Prov. Bali (31 Maret – 2 April)
- BKSAP SDGs Day di Surakarta, Jawa Tengah (8-10 April)
- BKSAP SDGs Day di Pemkot Bandung dan FISIP Univ. Pasundan
- BKSAP SDGs Day di Cirebon, (25-27 April)
- BKSAP SDGs Day di Karawang, (5 Mei 2021)
- BKSAP SDGs Day di Kantor Gubernur Prov. NTB (7 – 9 Juni)
- BKSAP SDGs Day di Kantor Gubernur Prov. Banten (10 – 11 Juni)
- BKSAP SDGs Day ke Pemerintah Kabupaten Jembrana, 31 Agustus 2021
- BKSAP SDGs Day ke Pemerintah Kabupaten Bogor, 3 September 2021
- BKSAP SDGs Day ke Pemerintah Kota Palembang, 10 September 2021
- BKSAP SDGs Day ke Pemerintah Kabupaten Bangli, 14 September 2021
- BKSAP SDGs Day Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten (13 – 15 Sept)
- BKSAP SDGs Day Universitas Subang Jawa Barat (16 – 18 Sept)
- BKSAP SDGs Day ke Pemerintah Kabupaten Banyumas, (21 Sept 2021)
- BKSAP SDGs Day ke Pemerintah Kabupaten Gianyar, (27 Sept 2021)
- BKSAP SDGs Day Univ. Islam Bekasi Jawa Barat (Unisma) (28 – 30 Okt)
- BKSAP SDGs Day Unpam Tangsel (2 -3 Des)

b) Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) BKSAP

Kunjungan Kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) ke Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 5 s.d. 7 Desember 2021

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung fungsi Dewan, Biro KSAP ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021. Dalam DIPA tersebut, Biro KSAP mengelola 2 Satuan Kerja (Satker) Anggaran, yaitu Satker Setjen dan Satker Dewan. Dengan DIPA tersebut Biro KSAP melaksanakan tugas dan fungsi Biro KSAP melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja.

1. KINERJA ANGGARAN SATKER DEWAN

Realisasi anggaran tahun 2021 untuk Satker Dewan sebesar Rp.125.563.005.487,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) setara dengan 67,84% dengan rincian sebagaimana dalam table berikut ini :

Tabel 5
Realisasi Anggaran tahun 2021 untuk Satker Dewan

No	Kegiatan	PAGU	Realisasi	Sisa Anggaran
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Kerjasama Internasional	20,742,295,000	14,472,820,168	6,269,474,832
2	Kerjasama Regional	9,669,031,000	7,085,401,247	2,583,629,753
3	Kerjasama Bilateral	36,198,655,000	28,290,761,729	7,907,893,271
4	Alih Bahasa	4,548,113,000	3,252,703,270	1,295,409,730
	Jumlah	71,158,094,000	53,101,686,414	18,056,407,586

Anggaran Satker Dewan digunakan untuk penyelenggaraan konferensi dalam negeri, pengembangan hubungan kerjasama luar negeri dan pelaksanaan peran diplomasi Anggota DPR RI.

Pengiriman Delegasi BKSAP ke Luar Negeri terdiri dari:

1. Pengiriman Delegasi DPR RI ke Konferensi/Sidang-sidang yang terkait dengan kerja sama organisasi Parlemen internasional yang meliputi IPU, PUIC, GOPAC, OECD, WTO, badan-badan dibawah PBB dan organisasi internasional lainnya.
2. Pengiriman Delegasi DPR RI ke Konferensi/Sidang-sidang yang terkait dengan kerja sama organisasi Parlemen regional yang meliputi AIPA, APA, APPF, dan organisasi regional lainnya
3. Pengiriman Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Negara Sahabat ke Negara-negara sahabat dan Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI.
4. Pengiriman Delegasi kunjungan Individu ke berbagai negara sebagai bentuk diplomasi parlemen secara perorangan.

Panitia Kerja (Panja) BKSAP

Biro KSAP telah memberikan dukungan bagi BKSAP DPR RI untuk pembentukan Panitia Kerja (Panja) di Tahun 2021 yaitu:

1. Panitia Kerja (Panja) BKSAP tentang Kerjasama Indo Pacific; dan
2. Panitia Kerja (Panja) BKSAP tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Realisasi anggaran tahun 2021 untuk anggaran Dewan tidak tercapai maksimal karena:

1. Beberapa Grup Kerjasama Bilateral tidak terlaksana kunjungannya disebabkan parlemen negara sahabat tidak bisa menerima kunjungan terkait protokol Kesehatan

di masing-masing negara yang masih sangat membatasi pertemuan fisik karena pandemi COVID-19.

2. Konferensi dan Sidang Internasional dilakukan secara virtual karena Pandemi Covid-19 yang membatasi perjalanan internasional.

Tabel 6
Grafik Perbandingan Realisasi 2020 dan 2021 Satker Dewan

No	Deputi / Biro / Pusat / Inspektorat / Bagian	2020			2021		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Biro Kerjasama Antar Parlemen	38,069,231,000	21,189,912,620	55,66	71,158,094,000	53,101,686,414	74,62

Apabila dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya, pada tahun 2021 realisasi anggaran untuk satker Dewan mengalami peningkatan sebesar 18,96 %. Dimana pada tahun 2020 realisasi anggaran adalah sebesar 55,66% dan di tahun 2021 realisasi anggaran adalah 74.62%.

2. KINERJA ANGGARAN SATKER SETJEN

Selain penggunaan Anggaran dengan Satuan Kerja Dewan sebagaimana tersebut diatas, kinerja Biro Kerjasama Antar Parlemen juga didukung oleh Anggaran dengan Satuan Kerja Sekretariat dengan pagu yang berjumlah Rp. 4.418.351.000 (empat milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh satu rupiah)

Dari jumlah tersebut, sampai dengan bulan Desember 2021 atau sampai dengan Triwulan IV, telah terealisasi sebesar **Rp 4.287.822.120,-** (*Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh Rupiah*) atau **97,05 %** (*Sembilan Puluh Tujuh koma Nol Lima Persen*).

Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV digunakan untuk pelaksanaan kegiatan berikut :

- 1) Perumusan Bahan Kebijakan Biro KSAP;

- 2) Fasilitasi Kerja Sama Organisasi Internasional, Regional, Bilateral dan Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota;
- 3) Pelaksanaan Pengiriman Penerjemah dalam rangka pengembangan SDM, dan kegiatan-kegiatan pendidikan serta seminar di daerah dan luar negeri.
- 4) Pelaksanaan Pengiriman Delegasi Setjen dan BK DPR RI ke Sidang IPU ke-143 di Madrid, Spanyol.

Tabel 7

Realisasi Anggaran Biro KSAP tahun 2021 untuk Satker Setjen

No	Kegiatan	PAGU 2021	Realisasi	Sisa Anggaran
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Anggaran Biro Kerjasama Antar Parlemen	3.078.997.000	3.059.116.920	19.880.080
2	Bagian Set. KSO Internasional	454.097.000	419.353.000	34.744.000
3	Bagian Set. KSO Regional	40.500.000	40.460.000	40.000
4	Bagian Set. KSB	270.444.000	268.760.000	1.684.000
5	Bagian Alih Bahasa	574.313.000	500.132.200	74.180.800
	Jumlah	4.418.351.000	4.287.822.120	130.528.880

Tabel 8

Grafik Perbandingan Realisasi 2020 dan 2021 Satker Setjen

No	Deputi / Biro / Pusat / Inspektorat / Bagian	2020			2021		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Biro Kerjasama Antar Parlemen	1,614,438,000	1,596,080,250	98.86	4.418.351.000	4.287.822.120	97,05

Apabila dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya, pada tahun 2021 realisasi anggaran untuk satker setjen DPR RI mengalami penurunan sebesar 1,81%.

Dimana pada tahun 2020 realisasi anggaran adalah sebesar 98.86% dan di tahun 2021 realisasi anggaran adalah 97.05%.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Biro KSAP tahun 2021 telah dilaksanakan dengan optimal, semua kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif pada visi dan misi Biro KSAP. Namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan kepada Anggota Dewan untuk lebih baik lagi. Mengenai keberhasilan, hambatan dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan yang dicapai Biro Kerjasama Antar Parlemen antara lain:

1. Memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bersih Melayani
2. Terwujudnya Portal SDGs DPR sebagai wadah untuk memonitori pelaksanaan SDGs di Indonesia guna mencapai target terwujudnya 17 Panja SDGs pada tahun 2030.
3. Diluncurkannya Buku putih mengenai *“Agenda for Green Economy in Indonesia”*

B. HAMBATAN DAN MASALAH

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, Biro KSAP telah berupaya maksimal dalam memberikan dukungan teknis, administratif dan substansi kepada DPR RI. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena dinamika agenda DPR yang mengakibatkan serapan anggaran tidak maksimal dan selain itu tidak dipungkiri masih ada catatan dari Anggota Dewan dalam hal kualitas materi yang disiapkan, dan kecepatan serta ketepatan penyiapan hal-hal teknis lainnya.

Hal ini disebabkan oleh:

1. Pengembangan SDM pegawai

Saat ini jumlah SDM di Biro KSAP sudah meningkat baik jumlah maupun kualitas Pendidikan. Kemudian, terkait erat dengan tugas dan fungsi Biro KSAP yang utamanya melakukan analisis terhadap beragam isu-isu bilateral/regional/internasional; memberikan dukungan untuk persidangan di dalam maupun di luar negeri; serta dukungan penerjemahan baik lisan maupun tertulis, staf tersebut perlu memiliki penguasaan analisis yang baik serta bahasa Inggris yang sempurna dan pengetahuan bahasa asing lainnya dengan baik, disamping kompetensi dan penguasaan ilmu-ilmu lain yang baik pula. Perlu diklat-diklat yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di Biro KSAP.

2. Kurangnya kordinasi, baik antar unit di BKSAP sendiri, dengan unit kerja di luar BKSAP maupun dengan instansi luar.

Hal ini terjadi antara lain karena volume kegiatan yang cukup banyak yang menyita sebagian besar waktu yang ada, sehingga tidak tersedia cukup waktu yang memadai untuk kegiatan koordinasi.

3. Dukungan teknologi dan sarana/prasarana yang kurang memadai.

Tidak semua pegawai mendapatkan sarana ini dan walaupun ada sebagian besar sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Beberapa komputer yang tersedia masih belum maksimal untuk mengejar kecepatan dalam bekerja. Akses internet sudah disediakan, namun kadangkala masih terjadi putus sambung.

4. Situasi Pandemi Covid-19

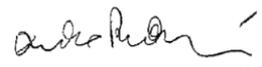
Pandemi Covid 19 yang masih berlangsung membuat banyak kegiatan Internasional yang tidak bisa dihadiri secara fisik karena kegiatannya dibatalkan / ditunda serta dilaksanakan secara daring.

C. PEMECAHAN MASALAH

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi perlu dilakukan dengan cara:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki penguasaan substansi tentang isu – isu hubungan internasional baik bilateral, regional maupun internasional, serta disiplin ilmu lainnya melalui diklat/sekolah.
2. Penyelesaian penyusunan *Standard Operation Procedure* (SOP) untuk kegiatan yang belum ada SOP, dan penyusunan panduan teknis untuk kegiatan lain yang diperlukan, dan pengajuan standar ISO untuk SOP yang sudah ada sebagai bukti layanan yang sudah berbasis internasional.
3. Untuk peningkatan penyerapan anggaran, perlu dioptimalkan dalam penyusunan *cash planning* serta kegiatan monitoring pada setiap bulannya serta melakukan revisi anggaran jika dibutuhkan dalam upaya meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran. Selain itu juga dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pimpinan dalam hal memberi informasi terkait kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana guna mendapatkan arahan lebih lanjut.
4. Pengembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPR-RI dan masyarakat, yaitu dengan updating database referensi BSAKP, inovasi aplikasi berbagai system kerja untuk kerja yang efektif dan efisien, dan update pemuatan informasi terbaru tentang BKSAP melalui web site DPR RI baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia;
5. Peningkatan sarana/prasarana yang memadai dan *updated* untuk menunjang seluruh kegiatan BKSAP.

Jakarta, 12 Januari 2022
Kepala Biro KSAP,



Endah TD Retnoastuti
NIP.196804021993022001